



Pengaruh *Good Corporate Governance*, Teknologi *Artificial Intelligence*, dan *Blockchain* terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Ramadhani^{1*}, Noer Sasongko²

^{1,2}Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: b200220230@student.ums.ac.id¹, ns243@ums.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), *Artificial Intelligence* (AI), dan *Blockchain* terhadap *Fraudulent Financial Reporting* (FFR) pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap serta mengungkapkan informasi mengenai GCG, AI, dan *Blockchain*. Variabel dependen diproses menggunakan manajemen laba model DeAngelo, sedangkan variabel independen meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, AI, dan *Blockchain*. Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan *Blockchain* tidak berpengaruh terhadap *Fraudulent Financial Reporting*, sedangkan *Artificial Intelligence* berpengaruh dalam menekan *Fraudulent Financial Reporting* pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 August 2026

First Revised 7 August 2026

Accepted 10 August 2026

First Available online 10 August 2026

Publication Date 10 August 2026

Keyword:

Artificial Intelligence; Blockchain; Fraudulent Financial Reporting; Good Corporate Governance; Manajemen Laba.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi ekonomi telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik bisnis dan akuntansi global. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses keuangan, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam hal transparansi, integritas, dan pengawasan pelaporan keuangan. Dalam konteks ini, muncul fenomena *fraudulent financial reporting* (FFR) yang menjadi ancaman serius terhadap keandalan laporan keuangan perusahaan. Wells (2007) menyatakan bahwa kecurangan akuntansi atau juga dikenal sebagai fraud, mengacu pada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja, dengan motivasi negatif mendorong tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi seseorang atau pihak tertentu. ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membagi kecurangan akuntansi menjadi tiga kategori: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva, dan korupsi. Menurut Arens et al. (2009), kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat didefinisikan sebagai pelaporan yang salah, pengurangan jumlah, atau pengungkapan yang dilakukan dengan sengaja kepada penggunanya.

Kasus kecurangan (fraud) merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan hingga saat ini. Menurut Stamler, dkk. (2010) dalam (Harahap, dkk., 2022), fraud mencakup segala tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan tertentu. Selama berabad-abad, fraud telah menjadi bagian dari perilaku manusia. Hal ini terjadi baik di sektor publik maupun swasta, menyebabkan kerugian pada finansial dan reputasi perusahaan. Sebagaimana didefinisikan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dalam Indonesia Chapter 111 (2020), hasil survei menunjukkan bahwa jenis kecurangan yang paling merugikan didominasi oleh korupsi dengan persentase mencapai 69,9%, diikuti oleh penyalahgunaan aset sebesar 20,9%, dan kecurangan pada laporan keuangan yang hanya mencatatkan 9,2%. Meskipun kecurangan pada laporan keuangan memiliki proporsi yang relatif kecil, namun dampak kerugiannya tergolong paling besar. (Satiman & Suparmin, 2023)

Skandal paling besar yang berkaitan dengan praktik penipuan akuntansi di seluruh dunia adalah yang melibatkan Enron, yang dilaporkan telah menyajikan angka pendapatan yang tidak akurat serta mengubah neraca keuangan demi menciptakan kesan pencapaian finansial yang lebih baik. Di Indonesia, kasus penipuan juga muncul di sejumlah perusahaan, seperti yang terjadi di PT KAI pada tahun 2006 dengan memanipulasi laporan keuangan, PT Kimia Farma pada tahun 2001 yang memalsukan laba, PT Garuda Indonesia pada tahun 2019 yang melaporkan keuntungan yang tidak sesuai, PT Jiwasraya yang terlibat dalam manipulasi laporan keuangan, PT Indofarma pada tahun 2004 yang melanggar regulasi pasar modal, dan PT Hanson Internasional pada tahun 2016 yang melakukan pengakuan pendapatan sepenuhnya, yang menyebabkan laporan keuangan yang melebih-lebihkan (dikutip dari CNBC Indonesia, 5 Juni 2022) dalam (Ulum & Suryatimur, 2022).

Dalam penelitian ini, Good Corporate Governance diproksikan melalui empat mekanisme, yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial diyakini dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Dewan komisaris berfungsi sebagai organ pengawas independen yang bertugas memastikan manajemen menjalankan operasional sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan prinsip akuntabilitas. Komite audit, sebagai perpanjangan tangan dewan komisaris, bertanggung jawab mengawasi proses pelaporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Sementara itu, kepemilikan institusional dipandang mampu memperkuat pengawasan eksternal terhadap kinerja

manajemen, karena investor institusional pada umumnya memiliki sumber daya, akses informasi, dan kapasitas analisis yang lebih besar dibandingkan investor individu, sehingga lebih efektif dalam mendeteksi indikasi penyimpangan.

Tantangan integritas laporan keuangan tidak hanya disebabkan oleh lemahnya sistem pengawasan, tetapi juga karena adaptasi yang belum optimal terhadap kemajuan teknologi digital. Di era modern, pengawasan internal dan mekanisme pelaporan keuangan konvensional sering kali tidak mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan secara sistematis. Menurut Maisaroh dan Nurhidayati (2021), lemahnya penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) seperti transparansi, akuntabilitas, dan independensi sering kali dimanfaatkan menjadi pemicu terjadinya penyimpangan laporan keuangan. Good Corporate Governance yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan keuangan dibuat dengan dasar etika dan kepatuhan terhadap regulasi.

Selain faktor tata kelola, kemajuan teknologi digital membawa peluang besar dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan. *Artificial Intelligence* (AI) menjadi salah satu inovasi penting yang mampu mendeteksi pola transaksi tidak wajar dan menganalisis anomali secara otomatis. Menurut Vasarhelyi dan Kogan (2015), *Artificial Intelligence* berpotensi mewujudkan sistem *continuous auditing* yang memungkinkan pengawasan keuangan dilakukan secara real-time dan lebih akurat dibanding metode tradisional. *Artificial Intelligence* tidak hanya meningkatkan efisiensi audit, tetapi juga memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan manusia dalam proses pemeriksaan data keuangan. Namun demikian, Resalia et al. (2024) mengingatkan bahwa penerapan teknologi ini harus diimbangi dengan kebijakan tata kelola data yang akurat dan etika penggunaan algoritma agar tidak menimbulkan risiko baru dalam pengelolaan informasi keuangan.

Sementara itu, *Blockchain* juga menawarkan potensi besar dalam memperkuat transparansi pelaporan keuangan. Teknologi ini bekerja melalui sistem pencatatan terdistribusi yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah, sehingga menjamin keaslian dan keandalan data (Kayani, 2023). Abad-Segura et al. (2024) menegaskan bahwa *Blockchain* mampu menciptakan sistem pelaporan keuangan yang terpercaya dan efisien melalui peningkatan integritas data serta otomatisasi proses audit. Dengan kemampuan tersebut *Blockchain* dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat pengawasan internal dan menekan kemungkinan terjadinya manipulasi pelaporan. Kombinasi antara AI dan *Blockchain* diyakini dapat menghasilkan sistem keuangan yang lebih transparan dan terverifikasi secara digital, yang mendukung pelaksanaan prinsip GCG dalam organisasi modern.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan GCG dan teknologi digital memiliki peran penting dalam mengurangi praktik *Fraudulent Financial Reporting*. Keterbatasan penelitian sebelumnya terutama terletak pada belum adanya integrasi antara aspek tata kelola dan teknologi digital dalam satu kerangka analisis yang utuh. Fritzqha dan Gunawan (2024) menyoroti bahwa banyak penelitian yang masih berfokus pada pengaruh GCG terhadap fraud, tanpa mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat memperkuat efektivitas mekanisme tata kelola tersebut. Selain itu, sebagian besar studi masih menggunakan pendekatan deskriptif atau kualitatif yang belum mampu memberikan bukti empiris. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif diperlukan untuk menguji secara objektif dan terukur *Good Corporate Governance*, *Artificial Intelligence*, dan *Blockchain* terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

Melihat tingginya risiko manipulasi laporan keuangan di era digital, penelitian ini memiliki nilai strategis bagi penguatan integritas sektor keuangan nasional. Integrasi *Good Corporate Governance*, *Artificial Intelligence*, dan *Blockchain* diyakini mampu menciptakan sistem pelaporan keuangan yang transparan, efisien, serta berintegritas tinggi. Hasil dari penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis bagi dunia industri dan lembaga pengawasan keuangan dalam merancang kebijakan serta sistem pengendalian berbasis teknologi yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

1.1. Tinjauan Pustaka

Agency Theory (Teori agensi)

Teori keagenan menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana perbedaan kepentingan serta asimetri informasi dapat mendorong manajemen melakukan tindakan oportunistik, termasuk *fraudulent financial reporting* (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks ini, *Good Corporate Governance* (GCG) berperan sebagai mekanisme pengawasan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan pengendalian yang efektif untuk meminimalkan konflik keagenan serta praktik manipulasi laporan keuangan (Tunggal, 2012). Oleh karena itu, teori keagenan menjadi landasan untuk menjelaskan bahwa penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan transparansi, menjaga kejujuran antara manajemen dan pemilik, serta mengurangi risiko terjadinya *fraudulent financial reporting* (Maisaroh & Nurhidayati, 2021).

Information Reliability Theory (Teori Keandalan Informasi)

Teori keandalan informasi yang dikemukakan Belkaoui (2006) menyatakan bahwa informasi akuntansi dikatakan andal apabila dapat diverifikasi, bebas dari bias, dan mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara sebenarnya. Dalam era digital, keandalan informasi didukung oleh penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dan *blockchain*. AI mampu mengolah data dalam jumlah besar, mendeteksi pola transaksi yang tidak wajar, serta mendukung *continuous auditing* untuk mengidentifikasi kesalahan secara *real time* (Vasarhelyi & Kogan, 2015). Sementara itu, *blockchain* menyediakan catatan transaksi yang bersifat *immutable*, terenkripsi, dan dapat diverifikasi sehingga meningkatkan transparansi, mengurangi risiko manipulasi data, serta menghasilkan *audit trail* yang lebih andal (Kayani, 2023; Abad-Segura et al., 2024). Oleh karena itu, teori keandalan informasi menjadi landasan teoritis dalam menjelaskan peran AI dan *blockchain* dalam meningkatkan kualitas informasi keuangan serta menekan *Fraudulent Financial Reporting*.

Good Corporate Governance

Menurut Susetyo dan Ramdani (2020), *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem dan struktur yang digunakan untuk mengelola perusahaan guna meningkatkan nilai pemegang saham serta mengarahkan kepentingan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme pengendalian yang efektif. Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* diproses oleh kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial berperan dalam menyelaraskan kepentingan pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*) sehingga dapat mengurangi konflik keagenan (Pramono, 2020). Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 guna meminimalkan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu fungsi pengawasan

perusahaan (Kep. 29/PM/2004), sedangkan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi, seperti bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi, yang berperan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen (Rahardi, 2013).

Artificial Intelligence

Perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) telah menarik perhatian masyarakat global sejak istilah tersebut pertama kali diperkenalkan pada Seminar Dartmouth tahun 1956. AI merupakan teknologi yang memungkinkan komputer meniru cara berpikir manusia melalui dua pendekatan, yaitu simulasi fungsional yang meniru proses berpikir secara keseluruhan dan simulasi struktural yang meniru mekanisme kerja otak manusia (Li & Zheng, 2018). Teknologi ini memanfaatkan konsep *machine learning*, *deep learning*, dan *neural network* untuk memungkinkan komputer belajar, berpikir, menyelesaikan masalah secara otomatis, serta mengolah dan mengklasifikasikan data seperti gambar, teks, dan suara dengan tingkat akurasi yang tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan keuangan.

Blockchain

Blockchain muncul perdana di tahun 2008 sebagai dasar teknologi untuk mata uang digital *Bitcoin* (Nakamoto, 2008). *Blockchain* adalah teknologi yang berfungsi sebagai buku besar digital terdistribusi, atau DLT, yang memungkinkan banyak orang mencatat transaksi secara aman dan transparan di jaringan komputer tanpa memerlukan perantara atau pemerintah pusat. Jaringan komputer atau node yang mengelola *blockchain* memverifikasi dan mencatat transaksi. Konsep blockchain terdiri dari lima komponen utama: basis data yang tersebar (didistribusikan), transparansi melalui enkripsi, transmisi antar teman, berbasis pemrograman digital, dan perekaman data yang abadi. Menurut Kayani (2023), industri keuangan menggunakan blockchain untuk menangani transaksi yang melibatkan uang dan nilai tanpa terlibat dengan bank atau pihak ketiga.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *fraudulent financial reporting*

Good Corporate Governance (GCG) dalam penelitian ini diproksikan melalui empat mekanisme, yaitu kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajemen, sehingga manajer turut berperan sebagai pemegang saham. Berdasarkan teori keagenan, kondisi ini dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik, karena manajer ikut menanggung konsekuensi ekonomis dari keputusan yang diambilnya. Aziz et al. (2017) menjelaskan bahwa keberadaan kepemilikan manajerial meningkatkan efektivitas dan akurasi pengawasan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Owens-Jackson et al. (2009) turut menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme penyatuan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, sehingga mengurangi dorongan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi. Hasil penelitian Khomariah dan Khomsiyah (2023) turut mendukung bahwa kepemilikan manajerial berkaitan dengan upaya pencegahan kecurangan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H₁: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*

Pengaruh dewan komisaris terhadap *fraudulent financial reporting*

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum terhadap kebijakan pengurusan yang dijalankan oleh direksi, termasuk dalam proses penyusunan laporan keuangan. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam susunan dewan komisaris, semakin sesuai pula independensi pengawasan yang dijalankan terhadap manajemen. Indrasari et al. (2016) menemukan bahwa keberadaan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan perusahaan. Kaituko et al. (2023) turut menyatakan bahwa struktur corporate governance yang dijalankan dengan baik oleh dewan komisaris dan direksi mampu meminimalkan terjadinya kecurangan, karena pengawasan yang optimal akan mempersempit ruang gerak manajemen untuk melakukan manipulasi laporan keuangan. Tan et al. (2022) juga meneliti pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap kecurangan laporan keuangan dan menemukan keterkaitan di antara keduanya. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H₂: Dewan komisaris berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*

Pengaruh komite audit terhadap *fraudulent financial reporting*

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, khususnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam teori keagenan, komite audit berperan sebagai agen dari dewan komisaris yang mewakili pemilik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan yang dijalankan oleh manajemen. Marzuki et al. (2019) dan Ruchiatna et al. (2020) menemukan bahwa keahlian (expertise) anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*, karena anggota yang memahami akuntansi dan keuangan lebih mampu mendeteksi kejanggalan dalam laporan keuangan. Selain itu, komite audit turut berfungsi sebagai penghubung antara auditor eksternal dan manajemen, sehingga memperkuat efektivitas proses audit dan pengawasan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H₃: Komite audit berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *fraudulent financial reporting*

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga atau institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan institusi keuangan lainnya. Investor institusional pada umumnya memiliki sumber daya, akses informasi, dan kapasitas analisis yang lebih besar dibandingkan investor individu, sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan eksternal secara lebih efektif terhadap kinerja manajemen. Santiso (2016) menjelaskan bahwa keberadaan kepemilikan institusional mendorong pengawasan yang lebih intensif terhadap manajemen, sehingga dapat menekan peluang terjadinya manipulasi pelaporan keuangan. Penelitian lain turut menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan, mengingat pihak institusional lebih aktif menuntut transparansi dan akuntabilitas dari manajemen perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H₄: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*

Pengaruh teknologi *artificial intelligence* terhadap *fraudulent financial reporting*

Artificial Intelligence (AI) semakin dikenal karena kemampuannya dalam mendeteksi serta mencegah penipuan. AI digunakan untuk memproses data keuangan secara real-time, mengidentifikasi pola transaksi yang tidak lazim, dan memberikan peringatan awal terkait kemungkinan terjadinya fraud. Widiasta dan Julianto (2021) serta Resalia et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berbasis kecerdasan buatan dapat berperan dalam membantu proses audit, memperluas kemampuan deteksi penipuan, dan mendukung auditor dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian laporan keuangan. AI juga berkontribusi pada efisiensi proses dan konsistensi pengawasan keuangan, sehingga banyak organisasi memandang pemanfaatan AI sebagai salah satu opsi dalam sistem pencegahan fraud. Meskipun demikian, penerapan teknologi AI masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan infrastruktur digital, kebutuhan tenaga ahli, serta isu privasi dan perlindungan data sensitif (Sedarmayanti & Ismail, 2021). Untuk memaksimalkan pemanfaatannya, sejumlah penelitian lainnya menyatakan bahwa AI perlu diintegrasikan secara bertahap dengan kebijakan yang mempertimbangkan aspek etika serta tata kelola data (Vasarhelyi & Kogan, 2015; Zulkifli et al., 2025). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H₅: Teknologi *artificial intelligence* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*

Pengaruh *blockchain* terhadap *fraudulent financial reporting*

Blockchain juga dipandang sebagai salah satu perkembangan dalam pelaporan keuangan berbasis digital. Teknologi ini berfungsi sebagai sistem pencatatan transaksi yang transparan, aman, dan sulit diubah, sehingga dapat meminimalkan kemungkinan modifikasi informasi dalam laporan keuangan. Abad-Segura et al. (2024) menyatakan bahwa *blockchain* berperan dalam menjaga validitas data, mempercepat proses audit, serta memberikan perlindungan terhadap perubahan yang tidak terotorisasi. Sistem ini dianggap mampu membentuk kepercayaan pemangku kepentingan melalui fitur-fitur seperti pencatatan permanen, kontrak pintar, dan pendekatan akuntansi triple-entry. Penelitian lain, seperti Kayani (2023) dan Tambingon et al. (2018), menjelaskan bahwa *blockchain* berkaitan dengan penguatan kontrol internal keuangan dan memberikan audit trail yang dapat ditelusuri serta diverifikasi kapan pun. Meskipun demikian, penerapan *blockchain* masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti kesiapan teknologi, kebutuhan investasi awal, dan penyesuaian regulasi agar sesuai dengan standar pelaporan industri. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan oleh peneliti adalah:

H₆: *Blockchain* berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria perusahaan yang memiliki laporan keuangan lengkap serta mengungkapkan informasi mengenai *Good Corporate Governance* (GCG), *Artificial Intelligence* (AI), dan *Blockchain* (Sugiyono, 2019). Variabel dependen adalah *fraudulent financial reporting* yang diproksikan dengan manajemen laba menggunakan model DeAngelo, sedangkan variabel independen meliputi GCG yang diproksikan melalui kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan kepemilikan institusional, serta AI dan *blockchain* yang diukur menggunakan variabel dummy berdasarkan pengungkapan dalam

laporan tahunan (Autore et al., 2024). Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis melalui uji F, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap *fraudulent financial reporting* (Ghozali, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa *annual report* perusahaan sektor keuangan BEI periode 2021–2024. Sampel dipilih dengan *purposive sampling* sebanyak 24 perusahaan (96 observasi) dan setelah *outlier* menjadi 65 observasi. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh *Good Corporate Governance*, *Artificial Intelligence*, dan *Blockchain* terhadap *Fraudulent Financial Reporting*. Pemilihan sampel penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria	Jumlah
Daftar Perusahaan sektor Financials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024	106
(-)Daftar Perusahaan sektor Financial yang memiliki laporan keuangan lengkap dan tersedia periode 2021-2024	(100)
(-)Daftar Perusahaan sektor Financials yang menerapkan GCG,AI, dan BC periode 2021-2024	(96)
Jumlah sampel penelitian	24
Jumlah analisis data x 4 tahun	96

Berdasarkan kriteria yang telah ditemukan, 24 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi setiap variabel. Hasil analisis menggunakan SPSS disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KM	65	.000004	.746978	.02739746	.111237743
DK	65	2.000000	10.000000	5.26153846	2.238002200
KA	65	4.000000	35.000000	12.53846154	7.265235980
KI	65	.045714	1.000000	.77191734	.295891504
AI	65	.000000	1.000000	.98461538	.124034735
BC	65	.000000	1.000000	.96923077	.174035805
FFR	65	-.315213	2.013563	.00271203	.266089084
Valid N (listwise)	65				

Sumber: Output SPSS, 2026

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (KM) memiliki rata-rata sebesar 0,0274 dengan variasi yang cukup tinggi, mengindikasikan sebagian besar perusahaan memiliki proporsi kepemilikan manajerial yang relatif rendah. Dewan komisaris (DK) memiliki rata-rata 5,26 orang, sedangkan komite audit (KA) rata-rata berjumlah 12,54 dengan variasi yang cukup beragam antarperusahaan. Kepemilikan institusional (KI) memiliki rata-rata 0,7719 yang menunjukkan dominasi kepemilikan oleh institusi. Sementara itu, variabel *Artificial Intelligence* (AI) dan *Blockchain* (BC) masing-masing memiliki rata-rata sebesar 0,9846 dan 0,9692, yang mengindikasikan bahwa mayoritas perusahaan sampel telah mengadopsi kedua teknologi tersebut. Adapun *Fraudulent Financial Reporting* (FFR) memiliki rata-rata sebesar 0,0027 dengan nilai yang berfluktuasi dari negatif hingga positif, namun secara umum berada di sekitar titik netral, sehingga menunjukkan tingkat manajemen laba yang relatif rendah pada perusahaan sampel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah cara untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Hasil uji normal Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada Gambar 1. berikut:

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		65
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.07854031
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.074
	Negative	-.101
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.094

Gambar 1. Hasil uji normal Kolmogorov Smirnov

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan gambar 1. hasil uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,094. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,094 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam penelitian ini terpenuhi dan model regresi dapat digunakan untuk pengujian selanjutnya.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018). Pengujian dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dinyatakan bebas dari

multikolinieritas apabila nilai tolerance > 0,10 atau nilai VIF < 10. Adapun hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 3. berikut :

Tabel 3. Hasil Uji multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error					Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.988	.112		17.671	<.001		
	KM	-.051	.096	-.021	-.529	.599	.939	1.064
	DK	.011	.006	.092	1.785	.079	.569	1.758
	KA	-.002	.002	-.056	-1.092	.279	.578	1.731
	KI	-.018	.036	-.020	-.500	.619	.962	1.040
	AI	-2.042	.084	-.952	-24.312	<.001	.980	1.020
	BC	.009	.060	.006	.150	.881	.972	1.029

a. Dependent Variable: FFR

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance < 0,10 atau tidak ada yang memiliki nilai VIF yang lebih besar dari 10 (nilai VIF > 10). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan analisis uji spearman rho. Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji spearman rho yang disajikan dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations									
			KM	DK	KA	KI	AI	BC	Unstandardized Residual
Spearman's rho	KM	Correlation Coefficient	1.000	-.260*	-.110	-.170	-.147	.076	.095
		Sig. (2-tailed)	.	.037	.385	.175	.244	.547	.453
		N	65	65	65	65	65	65	65
	DK	Correlation Coefficient	-.260*	1.000	.583**	.189	.058	-.101	-.065
		Sig. (2-tailed)	.037	.	<.001	.132	.649	.421	.607
		N	65	65	65	65	65	65	65
	KA	Correlation Coefficient	-.110	.583**	1.000	.016	.154	-.157	-.047
		Sig. (2-tailed)	.385	<.001	.	.898	.221	.211	.707
		N	65	65	65	65	65	65	65
	KI	Correlation Coefficient	-.170	.189	.016	1.000	-.020	-.052	-.071
		Sig. (2-tailed)	.175	.132	.898	.	.874	.679	.572
		N	65	65	65	65	65	65	65
	AI	Correlation Coefficient	-.147	.058	.154	-.020	1.000	-.022	-.013
		Sig. (2-tailed)	.244	.649	.221	.874	.	.860	.916
		N	65	65	65	65	65	65	65
	BC	Correlation Coefficient	.076	-.101	-.157	-.052	-.022	1.000	-.019
		Sig. (2-tailed)	.547	.421	.211	.679	.860	.	.881
		N	65	65	65	65	65	65	65
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.095	-.065	-.047	-.071	-.013	-.019	1.000
		Sig. (2-tailed)	.453	.607	.707	.572	.916	.881	.
		N	65	65	65	65	65	65	65

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa dari uji heteroskedastisitas spearman rho nilai sig. pada masing-masing variabel diatas nilai alpha ($\alpha = 5\%$) atau 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel atau model regresi terbebas dari heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan menggunakan Durbin-Watson (DW) yang terdapat dalam tabel Model Summary. Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.955 ^a	.913	.904	.082502780	1.998

a. Predictors: (Constant), BC, AI, KM, KI, KA, DK

b. Dependent Variable: FFR

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan Tabel 5 nilai Durbin-Watson (DW) yang diperoleh adalah sebesar 1,998. Nilai DW tersebut berada di antara nilai du dan 4-du. Dengan jumlah sampel ($n = 65$) dan jumlah variabel independen ($k = 6$), nilai du berdasarkan tabel Durbin-Watson pada taraf 5% adalah sekitar 1,843. Dengan demikian, nilai $DW = 1,998$ berada pada daerah $du < DW < 4-du$ ($1,843 < 1,998 < 2,157$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi. Asumsi bebas autokorelasi dalam penelitian ini terpenuhi.

Analisis Linier Berganda

Analisis linear berganda digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh Good Corporate Governance, Artificial Intelligence, Blockchain terhadap Fraudulent Financial Reporting. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi berganda (multiple regression) dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Berikut adalah hasil analisis regresi yang dapat dilihat pada Tabel 6 :

Tabel 6. Analisis Linier Berganda

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error					Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.988	.112		17.671	<.001		
	KM	-.051	.096	-.021	-.529	.599	.939	1.064
	DK	.011	.006	.092	1.785	.079	.569	1.758
	KA	-.002	.002	-.056	-1.092	.279	.578	1.731
	KI	-.018	.036	-.020	-.500	.619	.962	1.040
	AI	-2.042	.084	-.952	-24.312	<.001	.980	1.020
	BC	.009	.060	.006	.150	.881	.972	1.029

a. Dependent Variable: FFR

Sumber: Output SPSS, 2026

Tabel 6 diatas menunjukkan bahwa persamaan linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$FFR = 1,988 - 0,051KM + 0,011DK - 0,002KA - 0,018KI - 2,042AI + 0,009BC + \varepsilon$$

Berdasarkan hasil regresi linier berganda, diperoleh nilai konstanta sebesar 1,998 yang menunjukkan nilai *Fraudulent Financial Reporting* (FFR) ketika seluruh variabel independen dianggap konstan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial (KM), dewan komisaris (DK), komite audit (KA), kepemilikan institusional (KI), dan *blockchain* (BC) tidak berpengaruh terhadap FFR karena memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Sebaliknya, *Artificial Intelligence* (AI) berpengaruh negatif signifikan terhadap FFR dengan koefisien sebesar -2,042 dan nilai signifikansi < 0,001, yang mengindikasikan bahwa peningkatan penerapan AI mampu menurunkan praktik *Fraudulent Financial Reporting* serta menjadi variabel yang memiliki pengaruh paling dominan dalam model penelitian.

Uji Hipotesis

Uji F

Uji statistik F digunakan dengan tujuan untuk menunjukkan semua variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Adapun hasil uji F yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.137	6	.689	101.288	<.001 ^b
	Residual	.395	58	.007		
	Total	4.531	64			

a. Dependent Variable: FFR

b. Predictors: (Constant), BC, AI, KM, KI, KA, DK

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan hasil Uji F (ANOVA) pada Tabel 7, diperoleh nilai Sig. <0,001 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti variabel independen yaitu KM, DK, KA, KI, AI, dan BC secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen FFR. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan layak (fit) dan dapat digunakan untuk memprediksi variabel FFR.

Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji t terkait pengaruh Good Corporate Governance (KM,DK,KA,KI), Artificial intelligence, Blockchain terhadap Fraudulent Financial Reporting disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8. Hasil Uji t

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1.988	.112		17.671	<.001
	KM	-.051	.096	-.021	-.529	.599
	DK	.011	.006	.092	1.785	.079
	KA	-.002	.002	-.056	-1.092	.279
	KI	-.018	.036	-.020	-.500	.619
	AI	-2.042	.084	-.952	-24.312	<.001
	BC	.009	.060	.006	.150	.881

a. Dependent Variable: FFR

Sumber: Output SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji t, variabel kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan *blockchain* tidak berpengaruh terhadap *Fraudulent Financial Reporting* (FFR) karena masing-masing memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sebaliknya, *Artificial Intelligence* (AI) berpengaruh negatif signifikan terhadap FFR dengan nilai signifikansi 0,000 (<0,05), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan AI, semakin rendah tingkat *Fraudulent Financial Reporting*. Temuan ini mengindikasikan bahwa dari seluruh variabel yang diuji, hanya AI yang terbukti efektif dalam menekan praktik kecurangan pelaporan keuangan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat (Ghozali, 2018). Nilai koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.955 ^a	.913	.904	.082502780

a. Predictors: (Constant), BC, AI, KM, KI, KA, DK

b. Dependent Variable: FFR

Sumber: Output SPSS, 2026

Nilai R sebesar 0,955 menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dengan *Fraudulent Financial Reporting* (FFR). Nilai R^2 sebesar 0,913 mengindikasikan bahwa 91,3% variasi FFR dapat dijelaskan oleh kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, *Artificial Intelligence* (AI), dan *Blockchain* (BC), sedangkan 8,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selain itu, nilai Adjusted R^2 sebesar 0,904 menunjukkan bahwa model tetap memiliki kemampuan penjelasan yang sangat baik setelah memperhitungkan jumlah variabel dan sampel, didukung

oleh nilai Std. Error of the Estimate sebesar 0,0825 yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model relatif kecil.

Pembahasan

Pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, variabel Kepemilikan Manajerial (KM) memperoleh nilai t hitung sebesar -0,529 dengan nilai sig sebesar 0,599. Nilai sig tersebut lebih besar dari tingkat sig $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa Kepemilikan Manajerial (KM) tidak berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR). Arah koefisien yang negatif ($B = -0,051$) menunjukkan arah hubungan yang berlawanan antara kepemilikan manajerial dan FFR, namun hal tersebut tidak terbukti secara statistik.

Hasil ini sejalan dengan nilai rata-rata (mean) Kepemilikan Manajerial yang rendah, yaitu sebesar 0,02739746 atau sekitar 2,73% berdasarkan hasil statistik deskriptif penelitian ini. Rendahnya kepemilikan saham manajerial pada perusahaan sektor keuangan yang menjadi sampel penelitian mengindikasikan bahwa proporsi kepemilikan manajemen belum cukup untuk menciptakan keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham secara keseluruhan, sehingga tidak berpengaruh terhadap penurunan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Secara teoritis, konsep kepemilikan manajerial merujuk pada mekanisme tata kelola yang menyelaraskan kepentingan antara pihak manajemen (agent) dengan pemilik perusahaan (principal) sebagaimana dijelaskan dalam Agency Theory oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori tersebut menyatakan bahwa ketika manajemen turut memiliki saham perusahaan, mereka akan bertindak lebih bertanggung jawab karena secara langsung menanggung risiko keuangan akibat tindakan yang merugikan perusahaan, termasuk pelaporan keuangan yang curang. Namun demikian, dalam konteks penelitian ini, kepemilikan manajerial yang kecil tidak memberikan dampak karena besaran saham yang dimiliki belum mencapai ambang batas yang cukup untuk mendorong perubahan perilaku manajerial secara substansial.

Menurut Nasution dan Setiawan (2007), semakin besar proporsi kepemilikan manajerial maka semakin besar motivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara jujur karena mereka turut menanggung konsekuensi atas tindakan manipulatif. Namun apabila proporsi kepemilikan manajerial kecil seperti pada penelitian ini, maka insentif tersebut menjadi tidak cukup. Hal ini juga didukung oleh Rahardi (2013) yang menyatakan bahwa efektivitas kepemilikan manajerial dalam menekan fraud bergantung pada besaran proporsinya dalam struktur kepemilikan perusahaan secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Pratiwi Nila Sari dan Cahyadi Husadha (2020) yang meneliti pengungkapan corporate governance terhadap indikasi fraud dalam pelaporan keuangan dan menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak selalu terbukti berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Demikian pula dengan penelitian (Nugroho & Afifi, 2022) yang menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan manajerial terhadap pencegahan fraud bergantung pada besar kecilnya porsi kepemilikan tersebut dan kondisi industri yang diteliti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024, Kepemilikan Manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting.

Pengaruh Dewan Komisaris (DK) terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, variabel Dewan Komisaris (DK) memperoleh nilai t hitung sebesar 1,785 dengan nilai sig sebesar 0,079. Nilai sig tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa Dewan Komisaris (DK) tidak berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR). Nilai koefisien B = 0,011 menunjukkan arah hubungan yang positif, namun hal tersebut tidak terbukti secara statistik.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Dewan Komisaris memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 5,2615 dengan standar deviasi 2,2380. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perusahaan sampel memiliki sekitar 5 anggota dewan komisaris. Meskipun secara kuantitas jumlah dewan komisaris tampak cukup memadai, namun hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak mempengaruhi tingkat Fraudulent Financial Reporting pada perusahaan sektor keuangan yang diteliti.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, dewan komisaris adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertanggung jawab melakukan pengawasan umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam konteks Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), dewan komisaris merupakan mekanisme pengawasan yang penting untuk meminimalisasi perilaku oportunistik manajemen. Secara teoritis, semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka pengawasan terhadap dewan direksi seharusnya menjadi lebih baik dan dapat mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Namun demikian, Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa efektivitas fungsi pengawasan dewan komisaris tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggotanya, tetapi juga oleh independensi, kompetensi, dan aktivitas pengawasan yang dilakukan. Dewan komisaris yang besar belum tentu lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah fraud apabila tidak didukung oleh proses pengawasan yang berkualitas dan independensi yang memadai. Sejalan dengan hal tersebut, Maisaroh dan Nurhidayati (2021) menyatakan bahwa kualitas tata kelola yang baik tidak hanya bergantung pada ukuran dewan, melainkan pada penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas secara konsisten dalam praktik pengawasan sehari-hari.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian Saputra dan Rosharlianti (2025) yang menemukan bahwa dewan komisaris tidak selalu berpengaruh terhadap pencegahan fraud, terutama pada industri keuangan yang telah memiliki regulasi pengawasan eksternal yang ketat dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengawasan yang sudah dilakukan oleh regulator eksternal dapat mereduksi efek marginal dari penambahan jumlah anggota dewan komisaris dalam mencegah FFR. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024, Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting.

Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, variabel Komite Audit (KA) memperoleh nilai t hitung sebesar -1,092 dengan nilai sig sebesar 0,279. Nilai sig tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa Komite Audit (KA) tidak berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR). Nilai koefisien B = -0,002 yang mendekati nol menunjukkan bahwa perubahan pada KA tidak berpengaruh terhadap FFR.

Berdasarkan statistik deskriptif, variabel Komite Audit memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 12,5384 dengan standar deviasi 7,2652. Nilai rata-rata yang relatif tinggi ini

mencerminkan bahwa perusahaan sektor keuangan rata-rata telah memiliki rapat komite audit yang cukup intensif dalam satu tahun. Namun demikian, frekuensi rapat yang tinggi tidak secara otomatis menghasilkan pengaruh terhadap penurunan FFR apabila tidak diimbangi dengan kualitas dan efektivitas dari rapat komite audit tersebut.

Berdasarkan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Dalam kerangka teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976), komite audit merupakan instrumen penting yang berfungsi sebagai pengawas independen terhadap proses pelaporan keuangan guna melindungi kepentingan pemegang saham dari perilaku oportunistik manajemen. Secara teoritis, semakin aktif komite audit dalam melakukan rapat pengawasan maka semakin rendah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Namun dalam praktiknya, Maisaroh dan Nurhidayati (2021) menjelaskan bahwa efektivitas komite audit tidak hanya diukur dari jumlah rapat yang dilaksanakan, melainkan dari kualitas pembahasan, kompetensi anggota, dan independensinya terhadap manajemen. Komite audit yang bertemu sangat sering namun tidak memiliki agenda pengawasan yang substansial atau tidak memiliki akses memadai terhadap informasi internal perusahaan tidak akan mampu mencegah fraud secara efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Ghozali (2018) bahwa ukuran kuantitas aktivitas komite audit saja tidak cukup untuk mencerminkan kualitas pengawasannya.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Satiman dan Suparmin (2023) yang menemukan bahwa pada lembaga keuangan non-bank di Indonesia, komite audit tidak selalu berpengaruh terhadap pencegahan fraud karena terdapat faktor-faktor lain yang lebih dominan dalam menentukan tingkat integritas laporan keuangan. Demikian pula dengan Ulum dan Suryatimur (2022) yang menyatakan bahwa variabel komite audit perlu disertai dengan variabel kualitas audit yang lebih mendalam agar menghasilkan pengaruh terhadap pencegahan kecurangan laporan keuangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024, Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting.

Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t , variabel Kepemilikan Institusional (KI) memperoleh nilai t hitung sebesar -0,500 dengan nilai sig sebesar 0,619. Nilai sig tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa Kepemilikan Institusional (KI) tidak berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR). Nilai koefisien $B = -0,018$ menunjukkan arah hubungan yang negatif, namun hal tersebut tidak terbukti secara statistik.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai rata-rata (mean) yang tinggi, yaitu sebesar 0,7719 atau sekitar 77,19%, dengan standar deviasi 0,2958. Tingginya rata-rata kepemilikan institusional pada perusahaan sampel mencerminkan bahwa sektor keuangan di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh institusi-institusi besar seperti bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi. Meskipun kepemilikan institusional tinggi, variabel ini tidak berpengaruh terhadap FFR dalam penelitian ini.

Rahardi (2013) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai saham yang dimiliki oleh institusi lain seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dan institusi-institusi lainnya. Dalam kerangka Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976), investor institusional dipandang sebagai pemegang saham yang lebih canggih (sophisticated investors) karena

memiliki sumber daya, keahlian, dan kapasitas untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap manajemen dibandingkan investor individual. Secara teoritis, kehadiran investor institusional yang besar seharusnya dapat menekan manajemen untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel dalam menyajikan laporan keuangan.

Namun demikian, Jannah (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi tidak selalu berdampak pada penurunan kecurangan laporan keuangan, terutama apabila investor institusional tersebut bersifat pasif atau tidak aktif terlibat dalam pengawasan operasional perusahaan. Investor institusional yang hanya berorientasi pada keuntungan finansial jangka pendek (*trading-oriented*) tidak melakukan monitoring intensif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Ariastuti et al. (2020) memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa efektivitas kepemilikan institusional dalam mencegah fraud sangat bergantung pada keaktifan investor institusional dalam mekanisme corporate governance perusahaan.

Temuan penelitian ini konsisten dengan penelitian Nugroho dan Afifi (2022) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap pencegahan fraud pada lembaga keuangan. Demikian pula dengan penelitian Ulum dan Suryatimur (2022) yang menyimpulkan bahwa pada sektor perbankan dan keuangan, kehadiran investor institusional belum cukup efektif dalam mengurangi risiko kecurangan laporan keuangan tanpa didukung mekanisme pengawasan aktif lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024, Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting.

Pengaruh Artificial Intelligence (AI) terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, variabel Artificial Intelligence (AI) memperoleh nilai t hitung sebesar -24,312 dengan nilai sig sebesar 0,000 ($< 0,001$). Nilai sig tersebut lebih kecil dari tingkat sig $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa Artificial Intelligence (AI) berpengaruh negatif terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR), dengan nilai koefisien B = -2,042 dan nilai standardized Beta sebesar -0,952.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel Artificial Intelligence memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,9846 yang mendekati nilai maksimum 1,000. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar perusahaan sektor keuangan yang menjadi sampel penelitian ini telah mengimplementasikan teknologi Artificial Intelligence dalam sistem operasional dan pelaporan keuangan mereka. Tingginya adopsi AI pada perusahaan sampel mencerminkan tren digitalisasi yang baik di sektor keuangan Indonesia selama periode pengamatan 2021-2024.

Arah pengaruh yang negatif bermakna bahwa semakin tinggi tingkat penerapan Artificial Intelligence dalam suatu perusahaan sektor keuangan, maka semakin rendah tingkat Fraudulent Financial Reporting (FFR) yang terjadi. Temuan ini mendukung landasan teori Information Reliability Theory yang dikemukakan Belkaoui (2006), yang menyatakan bahwa keandalan informasi akuntansi dipengaruhi oleh kemampuan sistem informasi yang mendukung proses akuntansi. Artificial Intelligence berperan nyata dalam mewujudkan keandalan tersebut melalui kemampuannya memproses data dalam jumlah besar, mendeteksi pola transaksi yang tidak lazim, dan mengidentifikasi potensi anomali secara otomatis dan real-time.

(Bumgarner & Vasarhelyi, 2018) menyatakan bahwa Artificial Intelligence mendukung continuous auditing, yaitu proses audit berkelanjutan yang memungkinkan deteksi kesalahan dan ketidaksesuaian secara real-time. Kemampuan AI untuk bekerja tanpa henti dan memproses ribuan transaksi menjadikannya jauh lebih efektif dibandingkan metode audit tradisional yang dilakukan secara periodik dan manual. Sistem berbasis AI dapat mengidentifikasi pola manipulasi laporan keuangan yang sulit dideteksi oleh auditor manusia, sehingga secara langsung menekan kemungkinan terjadinya Fraudulent Financial Reporting.

(Widiasa & Julianto, 2021) dalam penelitiannya menemukan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berbasis Artificial Intelligence berpengaruh negatif terhadap Fraudulent Financial Reporting. Sistem berbasis AI mampu mendeteksi transaksi mencurigakan, memverifikasi konsistensi data secara otomatis, dan menghasilkan peringatan dini (early warning) apabila ditemukan anomali dalam pola pelaporan keuangan. Resalia et al. (2024) juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa kecerdasan buatan yang diintegrasikan dalam proses audit keuangan terbukti dapat meningkatkan akurasi deteksi penipuan dan mendukung auditor dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian laporan keuangan secara lebih komprehensif.

Lebih lanjut, (Safitri & Ratnawati, 2025) menemukan bahwa Audit Artificial Intelligence berpengaruh terhadap kemampuan deteksi fraud dan kualitas audit judgment, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan praktik kecurangan pelaporan keuangan. (Zulkifli et al., 2025) juga menegaskan bahwa implikasi teknologi Artificial Intelligence terhadap kualitas laporan keuangan sangat nyata, terutama dalam meningkatkan akurasi, konsistensi, dan integritas informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan. Sedarmayanti dan Ismail (2021) menambahkan bahwa meskipun implementasi AI menghadirkan tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur dan etika penggunaan data, namun manfaatnya dalam mencegah kecurangan jauh melampaui tantangan tersebut apabila dikelola dengan kebijakan tata kelola yang tepat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024, Artificial Intelligence terbukti berpengaruh negatif terhadap Fraudulent Financial Reporting, yang artinya penerapan teknologi AI yang lebih intensif dapat menekan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Pengaruh Blockchain (BC) terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, variabel Blockchain (BC) memperoleh nilai t hitung sebesar 0,150 dengan nilai sig sebesar 0,881. Nilai sig tersebut lebih besar dari tingkat sig $\alpha = 0,05$. Hal ini berarti bahwa Blockchain (BC) tidak berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting (FFR). Nilai koefisien B = 0,009 dengan standardized Beta sebesar 0,006 menunjukkan bahwa Blockchain tidak berpengaruh terhadap FFR.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, variabel Blockchain memiliki nilai rata-rata (mean) yaitu sebesar 0,9692 dengan nilai standar deviasi 0,1740. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh perusahaan sektor keuangan dalam sampel penelitian ini belum mengimplementasikan teknologi Blockchain. Meskipun demikian, hal ini tidak berpengaruh terhadap FFR, sehingga menjadi temuan yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari berbagai perspektif teoritis dan empiris.

Koefisien positif yang tidak berpengaruh secara statistik ini dapat diinterpretasikan dalam kerangka Information Reliability Theory (Belkaoui, 2006), yaitu bahwa implementasi

Blockchain berpotensi meningkatkan kemampuan deteksi dan transparansi catatan keuangan, sehingga praktik kecurangan yang sebelumnya tersembunyi dapat lebih mudah teridentifikasi dan tercatat, meskipun hubungan tersebut belum terbukti berpengaruh dalam model penelitian ini.

Nakamoto (2008) menjelaskan bahwa Blockchain merupakan teknologi buku besar digital terdistribusi (Distributed Ledger Technology/DLT) yang memungkinkan pencatatan transaksi secara aman dan transparan di jaringan komputer tanpa memerlukan perantara. Karakteristik utama Blockchain yang bersifat permanen, transparan, dan tidak dapat diubah (immutable) memberikan jejak audit yang lengkap dan dapat diverifikasi kapan saja oleh pihak yang berwenang. Kayani (2023) menegaskan bahwa industri keuangan menggunakan Blockchain untuk menangani transaksi yang melibatkan uang dan nilai tanpa terlibat dengan pihak ketiga, sehingga menciptakan lingkungan pencatatan yang lebih akuntabel.

Abad-Segura et al., (2024) menyatakan bahwa Blockchain berperan dalam menjaga validitas data, mempercepat proses audit, serta memberikan perlindungan terhadap perubahan yang tidak terotorisasi. Sistem ini dianggap mampu membentuk kepercayaan pemangku kepentingan melalui fitur-fitur seperti pencatatan permanen, kontrak pintar (smart contracts), dan pendekatan akuntansi triple-entry. Dalam konteks penelitian ini, implementasi Blockchain yang luas pada perusahaan sampel dapat diartikan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki sistem pencatatan transaksi yang lebih terbuka dan terverifikasi, sehingga setiap anomali atau penyimpangan dalam pelaporan keuangan menjadi lebih mudah terdeteksi dan terukur melalui proksi Discretionary Accruals yang digunakan dalam penelitian ini.

Tambingon dkk. (2018) menjelaskan bahwa Blockchain berkaitan dengan penguatan kontrol internal keuangan dan memberikan audit trail yang dapat ditelusuri serta diverifikasi kapan pun. Fritzqha dan Gunawan (2024) juga menyatakan bahwa penerapan teknologi Blockchain dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan secara keseluruhan, namun dalam proses transisi adopsinya dapat memunculkan pola pelaporan yang berbeda dari sebelumnya.

Interpretasi lain yang relevan adalah bahwa perusahaan yang mengadopsi Blockchain merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki kompleksitas transaksi dan volume aktivitas keuangan yang lebih besar. Farah Labibah dan Caseba (2024) menyatakan bahwa penerapan Blockchain dalam fintech payment memiliki relevansi terhadap risiko penipuan komputer, namun dampaknya bergantung pada seberapa jauh implementasi teknologi ini terintegrasi dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI periode 2021-2024, Blockchain tidak berpengaruh terhadap Fraudulent Financial Reporting.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), *Artificial Intelligence* (AI), dan *Blockchain* terhadap *Fraudulent Financial Reporting* (FFR) pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan *blockchain* tidak berpengaruh terhadap FFR, sedangkan *Artificial Intelligence* terbukti mampu menekan FFR. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada cakupan sampel yang terbatas pada sektor keuangan, penggunaan proksi

dan data sekunder berbasis pengungkapan perusahaan, serta jumlah sampel yang relatif kecil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek dan periode penelitian, menggunakan proksi yang lebih komprehensif, serta menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi FFR. Dari sisi praktis, perusahaan perlu mengoptimalkan penerapan AI dan memperkuat kualitas tata kelola, regulator diharapkan menyusun regulasi yang mendukung adopsi teknologi digital, auditor perlu meningkatkan kompetensi di bidang teknologi, dan investor didorong untuk berperan lebih aktif dalam pengawasan perusahaan guna meningkatkan integritas pelaporan keuangan.

5. REFERENCES

- Abad-Segura, E., Infante-Moro, A., González-Zamar, M. D., & López-Meneses, E. (2024). Influential factors for a secure perception of accounting management with blockchain technology. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(2). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100264>
- Bumgarner, N., & Vasarhelyi, M. A. (2018). Continuous Auditing—A New View¹. In D. Y. Chan, V. Chiu, & M. A. Vasarhelyi (Eds.), *Continuous Auditing: Theory and Application* (p. 0). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78743-413-420181002>
- Farah Labibah Caseba, T. D. (2024). Penerapan Artificial Intelligence, Big Data, Dan Blockchain Dalam Fintech Payment Terhadap Risiko Penipuan Komputer (Computer Fraud Risk): a Systematic Literature Review. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1–15.
- Nugroho, D. H., & Afifi, Z. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud. *Yudishtira Journal : Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 2(3), 301–316. <https://doi.org/10.53363/yud.v2i3.42>
- Safitri, E. D., & Ratnawati, T. (2025). Jurnal Inovasi Akuntansi Modern Pengaruh Skeptisisme Profesional, Time Bduget Pressure Dan Audit Artificial Intelligence Terhadap Kemampuan Deteksi Fraud Dan Kualitas Audit Judgment Dengan Kepatuhan Terhadap Standar Audit Sebagai Variabel Moderasi Pada Au. *Jurnal Inovasi Akuntansi Modern*, 7(1), 29–54. <https://journalpedia.com/1/index.php/jiamVol.07No.1Februari2025>
- Satiman, S., & Suparmin, S. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lembaga Keuangan Non-Bank. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 7(2), 98. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v7i2.6740>
- Widiasa, I. P. J. P., & Julianto, I. P. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Artificial Intellignce Terhadap Kecenderungan Fraudulent Financial Reporting (Studi Empiris Pada Hotel Berbintang Di Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(1), 889–901.
- Zulkifli, Djafar, J. S., Triseptya, G. N., & Hasyim, H. S. M. (2025). Implikasi Teknologi Big Data dan Artificial Intelligence Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT Astra Agro Lestari di Era Society 5.0. *Jurnal Pabean*, 7(1), 87–102.
- Azizah Hasibuan, N., Dwi Lestari, A., Sari, S., Zeinatha Osa, Z., Chyntia Ovami, D., & Sitasi, C. (2025). Pengaruh Komposisi Dewan Dan Komite Audit Terhadap Kapitalisasi Pasar Perusahaan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 25(1), 8–16.

- Fritzqha Dica, & Juniati Gunawan. (2024). Pengaruh Teknologi Blockchain Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(2), 875–884. <https://doi.org/10.25105/0acqt455>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Pratiwi Nila Sari, & Cahyadi Husadha. (2020). Pengungkapan Corporate Governance Terhadap Indikasi Fraud Dalam Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 46–56. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i1.108>
- Samanto, H., & Pravasanti, Yuwita Ariessa Saputra, S. A. (2022). K19-Fp. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 1–7.
- Saputra, A. D., & Rosharlianti, Z. (2025). Pengaruh Pengendalian Internal, Audit Internal dan Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Fraud. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(1), 183–196. <https://doi.org/10.37481/jmeh.v5i1.1188>
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1328>
- Maisaroh & Nurhidayati. (2021). Pengaruh pengendalian internal dan good corporate governance terhadap pencegahan fraud. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy*, 23, 301-316.
- Sayidah, N. (2019). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, SOLVABILITAS DAN OPINI AUDITOR TERHADAP AUDIT DELAY. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2). <https://doi.org/10.25139/jaap.v2i2.1397>